

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Surabaya.

_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ali Achmad, dan Sudikno Mertokusumo, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2006, Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.

HS, Salim, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (VW), Sinar Grafika, Jakarta.

J Moleong, Lexy 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Remadja Karya, Bandung.

Lumban Tobing G. H. S., 1983, Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan Kedua), Erlangga, Jakarta.

Mas, Marwan 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syahrani, Rinduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardho, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

_____, dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2019, Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tirtaamidjaya, M.H, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Zainal Asikin H, dan Amiruddin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

C. Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi

Rollin, Crissty, 2022, *Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Oleh MPD Gabungan di Kalimantan Utara Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Kuntjoro, Neky, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta*

- menurut Kode Etik Notaris, Jurnal Lex Renaissance, Fakultas Universitas Islam Indonesia, Vol 1 Nomor 2. 2016.
- Kurnia, Arifani *Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta*, Jurnal Lex Renaissance, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 2 Nomor. 2017.
- Manullang, Herlina dkk, *Peranan Majelis Notaris Daerah (MPD) dalam Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Protokol Notaris*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1 Nomor 2. 2022.
- Patricia, Edelin, *Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik*, Jurnal Premise Law, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 7. 2019.
- Rizki Azalia Felda, dan Abdul Hariss. *Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Di Kota Jambi*, Jurnal Lex Specialis, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Nomor 22. 2015.
- Oktantia, Wizella, 2021, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh MPD Gabungan Terhadap Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Yoel Charlye Karinda, *Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018*, *Notary Journal*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 3. Nomor 1. 2023.

D. Internet

- Anonim, “Kabupaten Ciamis”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ciamis, diakses pada tanggal 13 Maret 2023, pukul : 15.46 WIB
- Antik, “Sejarah Kota Banjar Berpisah dengan Ciamis”,
<https://fokusjabar.id/2022/01/08/sejarah-kota-banjar-berpisah-ciamis/>,
(diakses pada tanggal 13 Maret 2023)

Anonim, “Kota Banjar”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjar, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)

Anonim, “Kabupaten Pangandaran”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangandaran, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)

Pebriansyah Ariefana, “Sejarah Kabupaten Pangandaran Hingga Keunikannya, Dulu Kecamatan di Ciamis”, <https://jabar.suara.com/read/2021/11/24/145252/sejarahkabupaten-pangandaran-hingga-keunikannya-dulu-kecamatan-di-ciamis>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)